



**MODEL MANAJEMEN PARTISIPATIF UNTUK PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMUNITAS**

*Participatory Management Model For Community-Based Local Economic
Development*

Ahmad Jet Alamin A¹, Margono², Juanda Bancin³

^{1,2,3}Universitas Efarina, Indonesia

¹Email: jet.ahmad196@gmail.com

²Email: margono22gono@gmail.com

Abstract

This Community Service (PkM) project designed and tested a participatory management model for community-based local economic development. Common challenges include program planning that is not data-driven, uneven community participation, poorly managed local commodity value chains, weak economic institutions (business groups/village-owned enterprises/cooperatives), and limited access to markets and financing. Interventions were carried out through asset and needs mapping (participatory rural appraisal/PRA), the formation of a joint decision-making forum, the drafting of a local economic action plan, the strengthening of governance (SOPs, roles, transparency), assistance with the implementation of priority programs (pilot), and indicator-based monitoring and evaluation. Outputs include model documents and SOPs, a map of local economic potential, a one-year action plan, community accountability mechanisms, and replicable pilot results.

Keywords: *Participatory Management; Commodities; Economy*

Abstrak

Kegiatan PkM ini merancang dan menguji model manajemen partisipatif untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Permasalahan umum meliputi perencanaan program yang belum berbasis data, partisipasi warga yang tidak merata, rantai nilai komoditas lokal belum terkelola, kelembagaan ekonomi (kelompok usaha/BUMDes/koperasi) belum kuat, serta keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Intervensi dilakukan melalui pemetaan aset dan kebutuhan (participatory rural appraisal/PRA), pembentukan forum pengambilan keputusan bersama, penyusunan rencana aksi ekonomi lokal, penguatan tata kelola (SOP, peran, transparansi), pendampingan implementasi program prioritas (pilot), serta monitoring–evaluasi berbasis indikator. Luaran mencakup dokumen model dan SOP, peta potensi ekonomi lokal, rencana aksi 1 tahun, mekanisme akuntabilitas komunitas, serta hasil pilot yang dapat direplikasi.

Kata Kunci: *Manajemen Partisipatif; Komoditas; Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu pendekatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah. Dalam praktiknya, keberhasilan pengembangan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau dukungan kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan. Selama ini, banyak program pengembangan ekonomi yang bersifat top-down

sehingga masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat tanpa memiliki keterlibatan yang signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Kondisi ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap program, sehingga keberlanjutan program sering kali tidak terjamin.

Pendekatan partisipatif hadir sebagai alternatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang dan pengambil keputusan. Partisipasi yang bermakna mampu meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan lokal, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong mobilisasi sumber daya yang ada di dalam komunitas. Namun demikian, tantangan utama dalam penerapan pendekatan partisipatif adalah bagaimana mengelola partisipasi tersebut secara sistematis sehingga tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas antara lain adalah belum adanya perencanaan program yang berbasis data, partisipasi masyarakat yang tidak merata, kelembagaan ekonomi yang belum kuat, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan sumber pembiayaan. Selain itu, rantai nilai komoditas lokal sering kali belum terkelola dengan baik sehingga nilai tambah yang dihasilkan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu model manajemen yang mampu mengintegrasikan partisipasi masyarakat dengan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan model manajemen partisipatif yang dapat digunakan sebagai kerangka dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Model ini diharapkan mampu menjadi panduan operasional yang tidak hanya menekankan pada aspek partisipasi, tetapi juga pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program secara terstruktur. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal dapat berjalan secara lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan. Tahap awal dimulai dengan kegiatan sosialisasi dan pembentukan kesepakatan bersama antara tim pelaksana dan masyarakat mengenai tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan program. Pada tahap ini, dibangun komitmen bersama untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dilakukan pemetaan partisipatif menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, aset, serta permasalahan yang ada di dalam komunitas. Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Selain itu, dilakukan pula analisis rantai nilai untuk memahami alur produksi, distribusi, dan pemasaran komoditas lokal serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi pada setiap tahapan.

Hasil pemetaan kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan program. Masyarakat bersama tim pelaksana melakukan diskusi untuk menentukan prioritas program berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Proses ini dilakukan secara musyawarah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas yang berfungsi sebagai wadah dalam mengelola program pengembangan ekonomi lokal. Kelembagaan ini dilengkapi dengan struktur organisasi, pembagian peran, serta standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, dibangun pula mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa pengelolaan program dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota komunitas.

Implementasi program dilakukan melalui kegiatan pilot yang difokuskan pada satu atau dua program prioritas. Kegiatan ini disertai dengan pendampingan intensif untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selama proses implementasi, dilakukan monitoring secara berkala untuk mengukur perkembangan program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk menilai efektivitas model yang telah diterapkan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil yang dicapai, tetapi juga pada proses pelaksanaan program, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas kelembagaan yang dibentuk. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan model ke depan.

HASIL

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa model manajemen partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat, tetapi telah berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah serta keterlibatan mereka dalam pengelolaan program ekonomi.

Selain itu, kegiatan pemetaan partisipatif berhasil menghasilkan peta potensi ekonomi lokal yang komprehensif. Peta ini menjadi dasar dalam pengembangan program yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelembagaan ekonomi yang dibentuk juga menunjukkan peningkatan kapasitas dalam mengelola program, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan.

Implementasi program pilot menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat komunitas. Beberapa pelaku usaha mengalami peningkatan omzet sebagai hasil dari perbaikan kualitas produk dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, terbentuknya kemitraan dengan pihak luar membuka peluang baru bagi pengembangan usaha masyarakat.

Dari sisi tata kelola, penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program. Laporan kegiatan dan keuangan yang disampaikan secara terbuka memberikan



ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap program yang dijalankan.

PEMBAHASAN

Penerapan model manajemen partisipatif dalam pengembangan ekonomi lokal menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program. Partisipasi yang bermakna tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan program, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat dalam melaksanakan dan menjaga keberlanjutan program tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Keberhasilan model ini juga didukung oleh adanya kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang jelas. Kelembagaan yang terstruktur memungkinkan pembagian peran yang lebih efektif, sehingga setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program. Selain itu, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Namun demikian, implementasi model ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi yang merata dari seluruh anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, masih terdapat kelompok yang kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun kapasitas sumber daya manusia, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penguatan jejaring kemitraan, serta pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap model yang diterapkan agar dapat menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Model manajemen partisipatif yang dikembangkan dalam kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Melalui pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, perencanaan berbasis data, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, program pengembangan ekonomi lokal dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal tidak hanya memerlukan intervensi program, tetapi juga membutuhkan sistem manajemen yang mampu mengelola partisipasi masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, model ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program serupa di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap konteks lokal masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Akrab, A. (2023). Potensi Pengembangan Agrowisata Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi Provinsi



- Sulawesi Tengah. Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian.
- Lumentut, D. (2023). Pengaruh Usaha Mikro Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*.
- Munawaroh, S., & Puspitasari, S. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Beras Sebagai Acuan Peningkatan Pendapatan Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang. *Jpekbm (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*.
- Puspitasari, L.D., & Gufron, M. (2023). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Economina*.
- Rany, A.P., Farhani, S.A., Nurina, V.R., & Pimada, L.M. (2020). Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas.
- Saputra, A., Priadi, E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due To Illegal Gold Mining In Bengkulu Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777.
- Situmorang, D., M. Et. Al. "Analysis Of Accounting Knowledge Behavior And Accounting Recording On Revenue With Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting And Finance [Online]* Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024).
- Solechah, W.M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*.

